



LPT

(LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS)

2023

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Kh. Samanhudi No. 1 Karanganyar, Komplek Perkantoran,
Cangakan, Karanganyar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Bupati no 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja.

Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Perindustriann, Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- b. Perumusan perencanaan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang perdagangan, bidang peridustrian dan bidang tenaga kerja. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang perdagan\gan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah serta transmigrasi,
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas, dan pelaksanaa tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Laporan Pelaksanaan Tugas 2023

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja - Kabupaten Karanganyar

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam usaha menumbuh kembangkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab dinas. Adapun urusan pemerintahan tersebut adalah :

- a. Urusan Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar
 - Urusan Tenaga Kerja
- b. Urusan Pilihan
 - Urusan Perdagangan
 - Urusan Perindustrian

Sejalan dengan hal tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan program-program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 22 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah);
14. Peraturan menteri dalam negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar No 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

17. Peraturan Bupati Karanganyar No 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar No 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.
18. Peraturan Bupati Karanganyar No 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja.

C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Unit Kerja merupakan dokumen pencapaian indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar. berdasarkan output dan outcome yang telah ditentukan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun dengan maksud untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pedoman tersebut merupakan hasil yang telah dicapai pada tahun 2023 dan dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Karanganyar di bidang Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja secara terencana, terfokus, dan berkesinambungan yang bertumpu pada kondisi, potensi, dan kebutuhan sektor Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja serta kemampuan dinas.

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disdagperinaker adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, tenaga kerja
2. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar susunan organisasi Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar terdiri atas Sekretariat, Bidang Perdagangan, Perindustrian, tenaga kerja dan serta UPT Balai Latihan Kerja. Adapun Tugas dan Fungsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga Kerja.
- b. Perumusan perencanaan bidang perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi pengendalian fasilitasi bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.

- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja .
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas.
- g. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengorganisasian, pemantauan evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Fungsi sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengorganisasian tatalaksana;
- e. Pengorganisasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengorganisasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan barang/ jasa.;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta pelaporan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, Kerjasama, kerarsipan, kehumasan, informasi dan dokumentasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Disdagperinaker.

3. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi Bidang Perdagangan terdapat jabatan fungsional Pengawas Perdagangan, dan penyuluh perindustrian dan perdagangan.

4. Kepala Bidang Tenaga Kerja

Kepala bidang tenaga kerja mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengorganisasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Kepala Bidang tenaga kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan, pendaftaran , pelatihan, dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan koordinasi bidang penempatan, hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penempatan hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan, hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Struktur organisasi Bidang Tenaga Kerja terdapat jabatan fungsional pengantar kerja dan Instruktur.

5. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala bidang perindustrian mempunyai tugas perumusan dan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di perindustrian.

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan, dan pemeriksaan perindustrian.
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan perindustrian.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan perindustrian.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala UPT

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang pada Disdagperinaker dapat dibentuk UPT, yang dipimpin oleh kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Standart Operating Procedure (SOP)

- a. SOP Pengelolaan Surat Masuk
- b. SOP Barang Milik Daerah
- c. SOP Unggah Informasi
- d. SOP Pengelolaan Surat Keluar
- e. SOP Prosedur Penyusunan Laporan Retribusi Jasa Usaha
- f. SOP Laporan Bulanan
- g. SOP Pelaksanaan Verifikasi SPJ
- h. SOP Penyusunan Laporan Retribusi Pelayanan Pasar
- i. SOP Pembuatan Keputusan Kepala Dinas
- j. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- k. SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
- l. SOP Prosedur Penyusunan SPJ
- m. SOP Prosedur Pengajuan SPP SPM GU dan LS

C. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 560/ 83 Tahun 2023 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenaga Kerjaan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

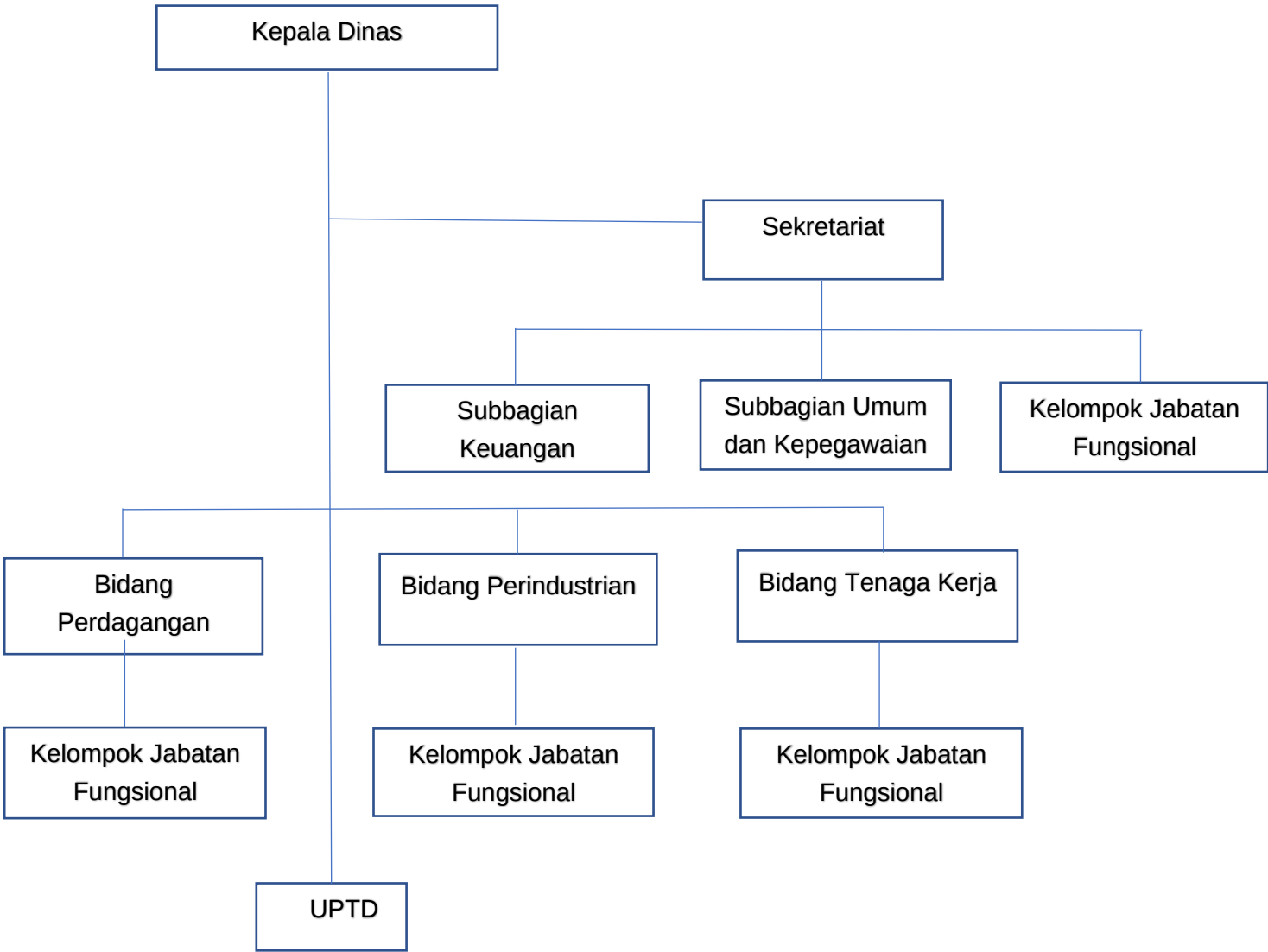
D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 49

Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, sebagaimana terlampir adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perdagangan membawahkan : jabatan fungsional
- d. Bidang Tenaga Kerja membawahkan : jabatan fungsional
- e. Bidang Perindustrian membawahkan : jabatan fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Bagan Susunan Organisasi
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Berdasarkan Perbup No 49 Tahun 2022



E. Kepegawaian

Susunan Kepegawaian

Kondisi aparatur atau pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja, Koperasi, Kabupaten Karanganyar menurut jenisnya dapat dibedakan dari pegawai struktural, pegawai fungsional, staf dan Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan daftar keseluruhan pegawai per tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Daftar Pegawai OPD

1.1) Sektretariat

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Martadi, S.Sos., M.M	19650323 198908 1 001	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Dinas
2	Sri Yanto, SE	19660507 199203 1 012	Penata Tk I	III/d	Sekretaris
3	Yosea Agus Kuntoro, ST	19840808 201101 1 010	Penata Tingkat I	III/d	Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Warsito	19700125 200701 1 015	Pengatur Muda	III/a	Petugas Keamanan Pada Sub Bag Umum & Kepegawaian
5	Yulita Wahyu K, A.md	19860709 201101 2 012	Penata Muda Tingkat I	III/B	Calon Arsiparis
6	Agus Sriyono	19840817 201001 1 003	Juru	I/d	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Pujiyanto	19780301 201001 1 002	Pengatur TK I	II/d	Pengadministrasi Umum Sub Bag Umum & Kepegawaian
8	Andyk Endrasto, SE	19770427 200801 1 016	Pengatur Muda	III/a	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
9	Suyati, SE, MM	19711001 199403 2 004	Penata Tk I	IV/a	Ka. Sub. Bagian Keuangan
10	Mulyati, SE	19661119 198703 2 003	Penata Tk. I	III/d	Penata Laporan Keuangan Sub Bag Keuangan
11	Okvitri Wahyuningrat, Amd	19811004 200803 2 003	Penata Muda	III/b	Penata Laporan Keuangan Sub Bag Keuangan
12	Purwono Bodro Sabani	19840525 200901 1 012	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Penata Laporan Keuangan Pd Sub Bag Keuangan
13	Sri Wahyuni, S.E	19730808 200701 2 014	Pengatur Tk. I	III/a	Penata Laporan Keuangan Pd Sub Bag Keuangan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
14	Isti Wuryani, SE	19751229 200801 2 009	Pengatur Tk. I	II/d	Verifikator Keuangan pd Sub Bag Keuangan
15	Sri Antiningsih, S.P., M.Eng	19760417 200604 2 004	Pembina	IV/a	Perencana Ahli Muda
16	Ika Wardaningsih, S.S.T	19880804 201101 2 017	Penata	III/d	Analisis Data dan Informasi

1.2) Bidang Perindustrian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Maryono, S.Sos, M.M.	19671231 198902 1 012	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Perindustrian
2	Fitriah Nikmatul Muharromah, S.T	19860905 202203 2 003	Penata Muda	III/a	Pengawas Industri
3	Agustina Purwitasri, ST	19870819 202012 2 003	Penata Muda	III/a	Analisis Industri

1.3) Bidang Tenaga Kerja

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Moh. Ibrahim Yuwono, SH.MM	19780728 200501 1 008	Pembina	IV/a	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
2	Suparno, S.I.P.,M.M	19650511 199203 2 003	Penata Tingkat I	IV/a	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
3	Tri Hastuti H, S.Sos	19701116 199303 2 003	Penata Tingkat I	III/d	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan Pada Seksi Pendaftaran TK
4	Juniatiningsih, S.A.P	19860513 201101 2 020	Penata Muda	III/a	Pranata Komputer Mahir
5	Tarwaka, PG.Dip.,Sc.M.Erg	19640929 198803 1 019	Pembina	IV/b	Pengantar Kerja Madya
6	Isti Titi Sarwosih, S.Sos, MM	19670507 199210 2 001	Penata Tk. I	III/d	Pengantar Kerja Ahli Muda

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
7	Joko Saptono, SE	19640605 199103 1 015	Penata Tingkat I	III/d	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia Pada Seksi Penempatan Tenaga dan Transmigrasi
8	Sri Suryatin, SH	19660703 199203 2 002	Penata Tingkat I	III/d	Instruktur ahli muda
9	Dadi Santoso, S.Psi	19671120 199803 1 003	Penata Tk. I	III/d	Penyuluh Tenaga Kerja pd Seksi Pelatihan & Produktivitas
10	Sugimin, SE	19641128 198803 1 007	Pembina Utama Muda	IV/a	Mediator Hubungan Industrial
11	Sumarno, SH	19680312 199803 1 014	Pembina Tingkat I	IV/C	Mediator HI Ahli Madya
12	Sugiarti, SE	19690513 199403 2 003	Penata TK I	III/d	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI
13	Benidikto Dwiputra Swara, S.Sos	19900131 202012 1 011	Penata Muda	III/a	Analisis Tenaga Kerja
14	Habibatul Hilma, S.Sos	19971104 202012 2 009	Penata Muda	III/a	Analisis Tenaga Kerja
15	M. Agus Fauzi, SE	19740420 200604 1 007	Penata Tk. I	III/d	Analisis Kompetensi & Kualifikasi Ketenagaan Pada Seksi Pelatihan & Produktivitas

1.4) UPT Balai Pelatihan Kerja

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Toni Setiawan, S.S.T.P.,M.Si	19920929 201406 1 001	Penata	III/c	Kepala UPT Balai Pelatihan Kerja
2	Tulus Wibowo, A.Md	19730827 200604 1 008	Penata Muda Tk. I	III/c	Kepala Tata Usaha UPT BLK
3	Parmin	19680130 200701 1 009	Pengatur	II/c	Pramu Kebersihan pada Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
4	Ngadiyo	19690513 200801 1 012	Juru Tk.I	I/d	Pelaksana Kegiatan
5	Daryanto, S.Pd	19640212 198303 1 004	Pembina Utama Muda	IV/c	Instruktur Madya

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
6	Kusumardiyah, SE	19640314 198603 2 013	Pembina	IV/b	Instruktur Madya
7	Dunus Ardian, Amd	19850303 201101 1 012	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana Lanjutan
8	Imam Riyadi, S.E	19730917 199403 1 002	Penata Tk. I	III/d	Instruktur Ahli Muda
9	Anang Fajar Riyadin, A.Md	19890511 201101 1 006	Penata	III/d	Instruktur Penyelia
10	M Yusuf Marzuki, ST	19780711 201001 1 006	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama
11	Aris Wandu, A.Md	19761217 201101 1 003	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana Lanjutan
12	Soni Setyawan, A.Md	19831201 201101 1 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Ahli Muda
13	Joko Purnomo, A.Md	19830214 201101 1 008	Penata Muda	III/a	Instruktur Mahir
14	Ainun Najib, Amd	19930702 201503 1 003	Penata Muda	III/b	Instruktur Pelaksana
15	Ichsan Junaidi, Amd	19810227 2015 03 1 001	Pengatur	Ili/d	Instruktur Mahir
16	Yuanita Sulissetiyo R, A.md	19900629 201503 2 004	Penata Muda	III/a	Instruktur Pelaksana Lanjutan
17	Muslih Hadi Harjantho, S.Pd	19911013 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama
18	M. Burhan Yasin, ST	19850605 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama

1.5) Bidang Perdagangan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Harjanto, SE,MM	19660507 199203 1 012	Penata Tk. I	III/d	Ka. Bid Perdagangan dan Pasar
2	Agus Sukasto, SE	19660817 199403 1 018	Penata Tk. I	III/d	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen
4	Martini, SE	19710124 199103 2 005	Penata Tk. I	III/d	Analisis Perdagangan Pada Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
5	Aries Budi Prasetyo N, S.T	19850114 201101 1 006	Penata	III/d	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen
6	Marcellinus Ferri P.k, A.md	19890602 201101 1 002	Penata Muda	III/b	Calon Penera
7	Priyono	19680505 200902 1 001	Pengatur TK.I	II/d	Petugas Keamanan Pada Sub Bag Umum & Kepeg
8	Suyanto	19690905 200902 1 001	Penata Muda	II/d	Pengaministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar
9	Dedi Wahyu Nugroho, S.S.T	19870924 201101 1 008	Penata Tk. I	III/d	Penyusun Perkembangan Harga & Pengkajian Psr Pada Seksi Pengembangan Pasar
9	Fitri Sis Wulandari	1970924 200701 2 013	Penata Tk. I	III/a	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar

1.6) Pengelola Pasar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Sri Hartoyo	19700603 199503 1 001	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Jungke)
2	Tarjimin	19670312 200701 1 032	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pd Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
3	Gunarno	19680709 200701 1 014	Pengatur Muda	II/a	Pelaksana pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
4	Joko Suparno	19660806 200701 1 026	Pengatur Tk. I	II/d	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Colomadu /Malangjiwan)
5	Sutarni	19700315 200701 2 013	Pengatur	II/b	Pelaksana pada Seksi Penataan dan Keamanan Ps Malangjiwan
6	Tarno	19660705 200701 1 022	Pengatur Tk. I	II/d	Juru Pungut Retribusi (Koordinator Karangpandan)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
7	Kristiyono	19691109 200701 1 017	Penata Muda	II/d	Juru Pungut Retribusi Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
8	Wagiyo	19681231 200701 1 078	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
9	Supardi, SE	19750218 200801 1 009	Penata	II/d	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Punukan)
10	Sunaryo	19660608 198603 1 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Matesih)
11	Mariman	19660909 200701 1 015	Penata Muda		Pengelola Pasar (Koordinator pasar kebakkramat)
12	Sri Wahyuni	19670112 200701 2 012	Penata Muda	III/a	Pengelola Pasar (Koordinator pasar belang)
13	Wahyono	19750706 200801 1 018	Pengatur Tk.I	II/d	Pengadministrasi Pengamanan dan Akses Pasar Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar (Koordinator Ps. Kemuning)
14	Endang Wahyuni	19660715 200701 2 020	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Pengamanan dan Akses pasar pada seksi penataan dan keamanan pasar (Koordinator pasar palur)
15	Satoto Budiwiyo	19660825 200701 1 007	Pengatur Tk.I	II/d	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Tawangmangu)
16	Sularno	19680211 200801 1 007	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
17	Joko Purnomo	19700914 200701 1 019	Pengatur	II/c	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Tuban/ Gondangrejo)
18	Sri Handayani	19761030 199803 2 002	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengadministrasi Pengamanan dan Akses Pasar Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
19	Joko Wiratno	19680306 200801 1 010	Pengatur Tk. I	II/d	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
20	Triyanto	19781223 201001 1 002	Pengatur Tk. I	II/d	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungann Akses Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
21	Wahyono	19780420 200902 1 002	Juru Tingkat I	I/d	Pelaksana pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
22	Paiman	19690705 200701 1 043	Pengatur	II/c	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Kwadungan)
23	Siti Harsini	19690816 199203 2 010	Penata Muda Tk. I	III/b	Pegelola Pasar (Koordinator Pasar Tegalgede)
24	Sarjono	19751228 200701 1 008	Pengatur Tk.I	III/a	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Jatipuro)
25	Marsini	19691001 200701 2 018	Penata Muda	Ili/a	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
26	Sundaryanto	19780606 201001 1 021	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pengadministrasi Pengamanan & Perlindungan Akses pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
27	Heri Wijiono	19661107 200701 1 011	Penata Muda	III/a	Pengelola Pasar (Koordinator Ps. Mojogedang)
28	Mulyadi	19680618 200701 1 021	Pengatur Tk.I	III/a	Juru Pungut Retribusi Pd Seksi Penataan dan Kemananan Pasar
29	Suwardi	19740905 201001 1 002	Pengatur Tk. I	II/d	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar Belang
30	Sabardiyanti, SE	19670306 198603 2 003	Penata Tingkat I	III/d	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Jumapolo)
31	Saryanto	19710818 200902 1 001	Pengatur TK.I	II/d	Juru Pungut Retribusi Pd Seksi Penataan dan Kemananan Pasar

2. Daftar Pejabat Struktural SKPD Yang Terisi

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Martadi, S.Sos., M.M	19650323 198908 1 001	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Dinas
2	Sri Yanto, SE	19660507 199203 1 012	Penata Tk I	III/d	Sekretaris
3	Yosea Agus Kuntoro, ST	19840808 201101 1 010	Penata Tingkat I	III/d	Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Suyati, SE, MM	19711001 199403 2 004	Penata Tk I	IV/a	Ka. Sub. Bagian Keuangan
5	Maryono, S.Sos, M.M	19671231 198902 1 012	Pembina	IV/a	Kabid. Perindustrian
6	Moh. Ibrahim Yuwono, SH,MM	19780728 200501 1 008	Pembina	IV/a	Kabid. Tenaga Kerja
7	Toni Setiawan, S.S.T.P.,M.Si	19920929 201406 1 001	Penata	III/c	Kepala UPT BLK

3. Daftar Pejabat Struktural SKPD Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	-	-

4. Daftar Pejabat Fungsional SKPD

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Sri Antiningsih, S.P., M.Eng	19760417 200604 2 004	Pembina	IV/a	Perencana Ahli Muda
2	Suparno, S.I.P., M.M	19680101 198603 1 003	Pembina	IV/a	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
3	Sumarno, SH	19680312 199803 1 014	Pembina Tingkat I	IV/b	Mediator HI Ahli Madya
4	Tarwaka, PG.Dip.,Sc.M.Erg	19640929 198803 1 019	Pembina TK. I	IV/b	Pengantar Kerja Ahli Madya
5	Isti Titi Sarwosih, S.Sos, MM	19670507 199210 2 001	Pembina	IV/a	Pengantar Kerja Ahli Muda

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
6	Sri Suryatin, SH	19660730 199203 2 002	Penata Tingkat I	III/d	Instruktur Ahli Muda
7	Daryanto, S.Pd	19640212 198303 1 004	Pembina Utama Muda	IV/c	Instruktur Madya
8	Kusumardiyah, SE	19640314 198603 2 013	Pembina TK. I	IV/b	Instruktur Madya
9	Dunus Ardian, S.T	19850303 201101 1 012	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Ahli Muda
10	Imam Riyadi, S.E	19730917 199403 1 002	Penata Tk. I	III/d	Instruktur Ahli Muda
11	Anang Fajar Riyadin, S.T	19890511 201101 1 006	Penata	III/d	Instruktur Ahli Muda
12	M Yusuf Marzuki, ST	19780711 201001 1 006	Penata Muda	III/a	Instruktur Ahli Muda
13	Aris Wandu, S.T	19761217 201101 1 003	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana Lanjutan
14	Soni Setyawan, S.T	19831201 201101 1 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana
15	Joko Purnomo, A.Md	19830214 201101 1 008	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Mahir
16	Ainun Najib, Amd	19930702 201503 1 003	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana
17	Ichsan Junaidi, Amd	19810227 2015 03 1 001	Penata Muda	III/a	Instruktur Mahir
18	Yuanita Sulissetiyo R, A.md	19900629 201503 2 004	Penata Muda	III/a	Instruktur Pelaksana Lanjutan
19	Muslih Hadi Harjantho, S.Pd	19911013 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama
20	M. Burhan Yasin, ST	19850605 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama

5. Daftar Pejabat Fungsional SKPD Yang Belum Terisi (Umum/Khusus)

NO	JABATAN	JUMLAH
2	Instruktur	8 Orang
3	Pengantar Kerja	2 Orang
JUMLAH		10 Orang

Susunan Pejabat Struktural Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas	: Martadi, S.Sos., M.M
2. Sekretaris	: Sri Yanto, SE
a. Kepala Sub Bagian Keuangan	: Suyati , SE,MM
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Yosea agus Kuntoro, S.T
3. Kepala Bidang Tenaga Kerja	: Moh. Ibrahim Yuwono, S.H, MM
4. Kepala Bidang Perdagangan	: Harjanto, SE, MM
5. Kepala UPT Balai Latihan Kerja	: Toni Setiawan, S.S.T.P.,M.S.i

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota	0,00 Ket.:	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/ kota
	2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	94,83 Ket.:		
	3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/ kota	1,00 perusahaan Ket.:		
2	1.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100,00 % Ket.:	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan
	2.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	70,25 % Ket.:		

3.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1,00 Instruktur Ket.:
4.	Persentase LPK yang terakreditasi	28,21 % Ket.:
5.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	98,28 % Ket.:
6.	Jumlah penganggur yang dilatih	11.049,00 orang Ket.:
7.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100,00 % Ket.:
8.	Persentase penyerapan lulusan	77,35 % Ket.:
9.	Lulusan bersertifikat kompetensi	7.013,00 Peserta Ket.:
10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	556,00 Orang

		yang diberikan pelatihan	Ket.:			
	11.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	11,00 Pelatihan Ket.:			
3	1.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	70,84 % Ket.:	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (Atas Dasar Harga Konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja	55,48 Tingkat Produktivitas Ket. :
	2.	Data tingkat produktivitas total	55,48 Tingkat Produktivitas Ket.:			
	3.		0,00 Ket.:			
4	1.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	64,92 % Ket.:	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan	84,54 % Ket. :
	2.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	70,66 % Ket.:			
	3.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan	5,00 Rekapan Ket.:			

	yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
4.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	46,90 %		
		Ket.:		
5.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	0,00		
		Ket.:		
6.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	4,66 %		
		Ket.:		
7.	Jumlah mogok kerja	0,00 %		
		Ket.:		
8.	Jumlah penutupan perusahaan	0,00 perusahaan		
		Ket.:		
9.	Jumlah perselisihan kepentingan	1,00 Perselisihan		
		Ket.:		
10.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0,00 Perselisihan		
		Ket.:		

	11.	Jumlah perselisihan PHK	42,00 Perselisihan Ket.:			
	12.	Jumlah pekerja/ buruh yang ter-PHK	107,00 Pekerja Ket.:			
	13.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3,00 Perselisihan Ket.:			
	14.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/ kota yang diberdayakan	1,00 LKS Ket.:			
	15.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	23,80 % Ket.:			
5	1.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	1.811,00 Loker Ket.:	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar	73,79 % Ket. :
	2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/ kota	2.026,00 pencaker Ket.:			

3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/ kota	33,00 BKK Ket.:			
4.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/ kota	136,00 Orang Ket.:			
5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2,00 Orang Ket.:			
6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/ kota	0,00 LPTKS Ket.:			
7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota	114,00 Perjanjian Ket.:			
8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1.495,00 Penempatan Ket.:			
9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	102,00 CPMI/CTKI Ket.:			
10.	Jumlah Calon Pekerja Migran	556,00			

	Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang Ket.:			
11.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0,00 Orang Ket.:			
12.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	214,00 Orang Ket.:			
13.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	80,00 Keluarga Ket.:			
14.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1,00 Layanan Ket.:			

C. URUSAN PILIHAN

1. Perdagangan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100,00 % Ket.:	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah	0,00 Ket. :

	2.	Persentase penerbitan TDG	100,00 % Ket.:	Toko Swalayan)	kabupaten/ kota	
	3.	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	86,00 % Ket.:			
	4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0,00 STPW Ket.:			
	5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah kabupaten/ kota	0,00 Pemohon Ket.:			
	6.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0,00 SPKA Ket.:			
	7.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100,00 % Ket.:			
	8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100,00 % Ket.:			
2	1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	97,10 % Ket.:	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% RDKK	97,10 % Ket. :

3	1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	87,43 % Ket.:	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/ kota	87,43 % Ket. :
	2.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	85,71 % Ket.:			

2. Perindustrian

No	IKK Output dan Capaian Kinerja			IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	0,00 % Ket.:	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100%J umlah industri kecil dan menengah tahun n-1	127,35 % Ket. :
2	1.	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50,00 % Ket.:	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		7,00 Indikator Ket. :
3	1.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	127,35 % Ket.:	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	100,00 % Ket. :
	2.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	1,50 % Ket.:			
4	1.		0,00 Ket.:	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	100,00 % Ket. :

			Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	
5	1.	0,00 Ket.:	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0,00 % Ket. :
6	1.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/ kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kabupaten/ kota 2,60 % Ket.:	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong Informasi bahan bakar/ energiInformasi tenaga kerja informasi investasi	105,00 % Ket. :

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Belum ada indikator 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
				2) Fasilitasi Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 90.000.000,00 Realisasi: Rp. 89.973.000,00 Persentase: (99,97%)	Belum ada indikator 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT	1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi:	Belum ada indikator 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		

			A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.970.000,00 Persentase: (99,00%)				
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Belum ada indikator 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
				3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.985.000,00 Persentase: (99,25%)	Belum ada indikator 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
				4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.950.000,00 Persentase: (99,00%)	Belum ada indikator 2 Dokumen	2 Dokumen (100.00%)		

			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.664.000,00 Persentase: (96,64%)	Belum ada indikator 12 Laporan	12 Laporan (100.00%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.955.000,00 Persentase: (97,75%)	Belum ada indikator 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 43.080.000,00 Realisasi: Rp. 42.710.000,00 Persentase: (99,14%)	Belum ada indikator 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 152.632.000,00 Realisasi: Rp. 142.986.300,00 Persentase: (93,68%)	Belum ada indikator 4 Unit	4 Unit (100.00%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 243.671.000,00 Realisasi: Rp. 242.948.200,00 Persentase: (99,70%)	Belum ada indikator 2 Paket	2 Paket (100.00%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 2.600.000,00 Realisasi: Rp. 2.530.000,00 Persentase: (97,31%)	Belum ada indikator 26 Dokumen	26 Dokumen (100.00%)		

			Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Anggaran: Rp. 6.457.000,00 Realisasi: Rp. 6.107.000,00 Persentase: (94,58%)	Belum ada indikator 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 62.400.000,00 Realisasi: Rp. 62.288.000,00 Persentase: (99,82%)	Belum ada indikator 32 Orang	32 Orang (100.00%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN	1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 6.000.000.000,00	Belum ada indikator 1 Unit	1 Unit (100.00%)		

			DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi: Rp. 4.783.114.675,00 Persentase: (79,72%)				
				2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 525.000.000,00 Realisasi: Rp. 485.919.000,00 Persentase: (92,56%)	Belum ada indikator 21 Unit	21 Unit (100.00%)		
				3) Pengadaan Mebel Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.832.000,00 Persentase: (99,16%)	Belum ada indikator 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
				4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 118.100.000,00 Realisasi: Rp. 116.325.000,00 Persentase: (98,50%)	Belum ada indikator 14 Unit	14 Unit (100.00%)		

				5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 37.440.000,00 Persentase: (93,60%)	Belum ada indikator 1 Unit	1 Unit (100.00%)		
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1) Pengolahan Data Retribusi Daerah Anggaran: Rp. 4.003.000,00 Realisasi: Rp. 3.947.800,00 Persentase: (98,62%)	Belum ada indikator 12 Laporan	12 Laporan (100.00%)		
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 349.500.000,00 Realisasi: Rp. 338.851.300,00 Persentase: (96,95%)	Belum ada indikator 1 Paket	1 Paket (100.00%)		

			Daerah					
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 10.640.183.705,00 Realisasi: Rp. 9.882.592.025,00 Persentase: (92,88%)	Belum ada indikator 134 Orang	134 Orang (100.00%)		
			m. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 361.300.000,00 Realisasi: Rp. 356.896.993,00 Persentase: (98,78%)	Belum ada indikator 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 3.497.800.000,00 Realisasi: Rp. 3.489.222.500,00 Persentase:	Belum ada indikator 12 Laporan	12 Laporan (100.00%)		

				(99,75%)				
			n. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 227.363.900,00 Realisasi: Rp. 215.553.600,00 Persentase: (94,81%)	Belum ada indikator 56 Kendaraan	56 Kendaraan (100.00%)		
			o. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Belum ada indikator 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			p. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran:	Belum ada indikator 1 Paket	1 Paket (100.00%)		

			DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.998.500,00 Persentase: (99,99%)				
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 17.920.000,00 Realisasi: Rp. 17.913.000,00 Persentase: (99,96%)	Belum ada indikator 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 226.370.000,00 Realisasi: Rp. 224.619.867,00 Persentase: (99,23%)	Belum ada indikator 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
			q. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan,	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 24.000.000,00 Realisasi: Rp. 23.995.000,00 Persentase: (99,98%)	Belum ada indikator 2 Dokumen	2 Dokumen (100.00%)		

			Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			r. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran: Rp. 8.000.000,00 Realisasi: Rp. 7.953.300,00 Persentase: (99,42%)	Belum ada indikator 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
			s. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Anggaran: Rp. 153.035.000,00 Realisasi: Rp. 149.627.600,00 Persentase: (97,77%)	Belum ada indikator 100 %	100 % (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	TENAGA KERJA		a. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabup aten/Kota	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 8.000.000,00 Realisasi: Rp. 7.762.000,00 Persentase: (97,03%)	Terlaksananya pembinaan TKA 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN P RODUKTIVIT AS TENAGA KERJA, Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Anggaran: Rp. 1.000.000,00 Realisasi: Rp. 964.800,00 Persentase: (96,48%)	Terlaksananya pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka persiapan pengajuan penghargaan produktivitas 1 Perusahaan	1 Perusaha an (100.00%)		
			c. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pencegahan	1) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 100.000.000,00	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga	1 Lembaga (100.00%)		

			dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabup aten/Kota	Realisasi: Rp. 94.639.000,00 Persentase: (94,64%)				
			d. PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA, Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabup aten/Kota	1) Pelayanan antar Kerja Anggaran: Rp. 8.000.000,00 Realisasi: Rp. 7.882.000,00 Persentase: (98,53%)	Terlaksananya pelayanan antar kerja 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			e. PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.754.000,00 Persentase: (99,18%)	Terlaksananya layanan penyediaan informasi pasar kerja 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			f. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN P RODUKTIVIT AS TENAGA KERJA,	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.520.000,00	Terlaksananya Bimtek Akreditasi LPK bagi LPK dan Petugas Pelayanan 60	60 Orang (100.00%)		

			Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase: (98,40%)	Orang			
			g. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 55.000.000,00 Realisasi: Rp. 54.944.500,00 Persentase: (99,90%)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perusahaan, Jumlah Perselisihan yang Dicegah 25 Orang	20 Perusahaan, 25 Orang (100.00%)		
				2) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 20 Perusahaan	20 Perusahaan (100.00%)		
			h. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN P	1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Anggaran:	Terlaksananya sosialisasi pengukuran	1 Perusahaan		

			RODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.000.000,00 Realisasi: Rp. 987.400,00 Persentase: (98,74%)	produktivitas ke perusahaan 1 Perusahaan	(100.00%)		
			i. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anggaran: Rp. 12.000.000,00 Realisasi: Rp. 12.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya sosialisasi peraturan penempatan tenaga kerja luar negeri 60 Orang	60 Orang (100.00%)		
			j. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.237.500,00 Persentase: (96,95%)	Terlaksananya pelatihan petugas antar kerja BKK 16 Orang	16 Orang (100.00%)		
			k. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	1) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Anggaran: Rp. 2.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara	7 orang, 3 LPK (100.00%)		

			KERJA, Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Realisasi: Rp. 1.805.000,00 Persentase: (90,25%)	Terintegrasi 7 orang, Terlaksananya pelayanan perizinan dan pendaftaran LPK 3 LPK			
			I. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.864.500,00 Persentase: (99,10%)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan, Sosialisasi UMK 1 Sosialisasi, Te rselenggaranya sidang 2 Sidang	1 Laporan, 1 Sosialisasi, 2 Sidang (100.00%)		
			m PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA, Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabup aten/Kota	1) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.840.000,00 Persentase: (99,47%)	Terlaksananya study banding unit layanan disabilitas kabupaten 100 persen	100 persen (100.00%)		

			n. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.679.150,00 Persentase: (98,72%)	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan 30 Perkara	30 Perkara (100.00%)		
			o. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Anggaran: Rp. 12.000.000,00 Realisasi: Rp. 11.653.000,00 Persentase: (97,11%)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100 Orang	100 Orang (100.00%)		
			p. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.770.000,00 Persentase: (97,70%)	Tercapainya koordinasi penyusunan RTK Makro 1 Pertemuan	1 Pertemuan (100.00%)		

			q. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Anggaran: Rp. 3.060.540.500,00 Realisasi: Rp. 2.989.338.900,00 Persentase: (97,67%)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 326 orang	326 orang (100.00%)		
--	--	--	---	---	--	------------------------	--	--

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PERDAGANGAN		a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1) Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Anggaran: Rp. 15.726.700,00 Realisasi: Rp. 13.205.450,00 Persentase: (83,97%)	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 7	7 Dokumen (100.00%)		

					Dokumen			
			b. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAF TARAN PERU SAHAAN, Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1) Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang Anggaran: Rp. 5.856.700,00 Realisasi: Rp. 5.840.500,00 Persentase: (99,72%)	Jumlah dokumen tanda daftar gudang 7 dokumen	7 dokumen (100.00%)		
			c. PROGRAM P ENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI P ERDAGANGA N, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Anggaran: Rp. 622.971.600,00 Realisasi: Rp. 622.319.350,00 Persentase: (99,90%)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 18 Pasar	18 Pasar (100.00%)		
			d. PROGRAM S TANDARDISA SI DAN PERLI NDUNGAN KONSUMEN, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Anggaran: Rp. 42.736.000,00 Realisasi: Rp. 40.475.904,00 Persentase: (94,71%)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1900 Unit	1800 Unit (94.74%)		

			Pengawasan					
			e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 12.441.500,00 Realisasi: Rp. 10.633.500,00 Persentase: (85,47%)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3200 Laporan	3200 Laporan (100.00%)		
			f. PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	1) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 409.404.000,00 Realisasi: Rp. 406.116.000,00 Persentase: (99,20%)	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi 45 UMKM	45 UMKM (100.00%)		

			Produk Dalam Negeri					
			g. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 16.961.100,00 Realisasi: Rp. 15.796.848,00 Persentase: (93,14%)	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina 42 Pelaku Usaha	42 Pelaku Usaha (100.00%)		
			h. PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di	1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 39.979.150,00 Persentase: (99,95%)	terbinanya pedagang 18 Pasar	18 Pasar (100.00%)		

			Wilayah Kerjanya					
			i. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Anggaran: Rp. 7.651.700,00 Realisasi: Rp. 7.584.200,00 Persentase: (99,12%)	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90 persen 5 Laporan	5 Laporan (100.00%)		
			j. PROGRAM P ENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI P ERDAGANGA N, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Anggaran: Rp. 71.000.000,00 Realisasi: Rp. 69.306.000,00 Persentase: (97,61%)	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 2 Pasar	2 Pasar (100.00%)		
2.	PERINDUSTRIA N		a. PROGRAM P ENGELOLAA N SISTEM	1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	Jumlah Industri yang sudah memiliki IUI dan	1 Kegiatan (100.00%)		

			INFORMASI INDUSTRI NASIONAL, Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.511.000,00 Persentase: (96,74%)	melaporkan Kegiatan Usahanya di Akun SIINAS 1 Kegiatan			
			b. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Anggaran: Rp. 614.600.200,00 Realisasi: Rp. 602.553.175,00 Persentase: (98,04%)	Terlaksanakannya Jumlah karyawan perusahaan rokok yang mengikuti kegiatan pelatihan dan ketrampilan kerja 240 orang	240 orang (100.00%)		

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN*Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

	<i>Nihil</i>
H. UNSUR KEWILAYAHAN	
	<i>Nihil</i>
I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	<i>Nihil</i>
J. UNSUR KEKHUSUSAN	
	<i>Nihil</i>

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima			Mutu Minimal			Keterangan
		Indikator	Target	Batas	Indikator	Target	Batas	

3. Indeks Pencapaian (IP) SPM

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	SI BAYARNO	Si Bayarno merupakan program E Retribusi, yaitu penarikan retribusi yang dilakukan secara online. Pedagang diwajibkan mempunyai kartu untuk transaksi retribusi harian. Pedangang harus mempunyai deposit di Bank Jateng. Apabila suatu saat pedagang tersebut tidak berjualan maka retribusi akan dikenakan secara akumulasi dihari berikutnya. Sebagai tahap awal E-Retribusi diberlakukan dipasar Nglano dan Matesih. E-Retribusi ini hanya dikenakan untuk retribusi kios. Rencana selanjutnya E-retribusi akan diterapkan di Pasar Tawangmangu dan Pasar Tuban.
2	E-MAKARYO	E-Makaryo adalah aplikasi milik Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jateng. E-Makaryo diperuntuk bagi pencari kerja yang ingin mendapatkan kartu tanda Pencari Kerja/ AK-1. E-Makaryo juga diperuntuk bagi Perusahaan yang ingin menginformasikan lowongan kerjanya. Bagi pencari kerja yang berminat mendaftar lowongan kerja yang ada di E-Makaryo sepanjang telah terdaftar sebagai pencari kejrta dapat mendaftar langsung aplikasi.

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Produktivitas Tahun 2022	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
2	Produktivitas Tahun 2022	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
3	Public Services of The year Jawa Tengah 2022	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Berkontribusi Aktif dalam Pemberdayaan UMKM	ICSB Regional Jawa Tengah
5	Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Tahun anggaran 2023 Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023. Total anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 27.930.688.005,- (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah), dengan serapan anggaran sebesar Rp. 26.024.331.487,- (Dua puluh enam milyar dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), atau 92.39%. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.906.356.518,- (Satu milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan semua sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 dan telah memperoleh pencapaian indikator output maupun outcome sebagaimana terlampir pada Bab III dan IV. Pencapaian indikator ini merupakan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023

B. Saran

Agar penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan baik maka tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan adalah :

- a. Memperkuat kinerja semua pelaksana dan pimpinan di Dinas.
- b. Memperkuat hubungan antara pemerintah, perusahaan dan asosiasi pekerja
- c. Memperkuat pendampingan pada pelaku usaha industri kecil.
- d. Meningkatkan layanan masyarakat tentang informasi ketenagakerjaan
- e. Meningkatkan kualitas mutu pelatihan berbasis kompetensi

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023. Laporan ini merupakan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pada Dinas dan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Karanganyar, Desember 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,
KABUPATEN KARANGANYAR

MARTADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001